

PRESS RELEASE

INAUGURASI ASEAN+3 MACROECONOMIC RESEARCH OFFICE (AMRO)

MENJADI ORGANISASI INTERNASIONAL

Pada hari ini, Jumat tanggal 19 Februari 2016, bertempat di Gedung *Monetary Authority of Singapore* (MAS) telah diselenggarakan upacara pembukaan *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* (AMRO) yang secara resmi bertransformasi menjadi sebuah organisasi internasional. Menandai capaian strategis ini, seluruh negara ASEAN+3 (ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea) hadir dalam seremoni dimaksud dengan tingkat kehadiran pejabat tinggi dari masing-masing Kementerian Keuangan dan Bank Sentral di kawasan ASEAN+3. Pejabat-pejabat penting dari berbagai organisasi internasional, kedutaan, lembaga-lembaga keuangan, dan lembaga-lembaga riset juga turut hadir dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada AMRO dan kepada ASEAN+3.

AMRO merupakan unit *surveillance* independen yang dibentuk oleh forum kerja sama ASEAN+3. Sesuai dengan hasil kesepakatan para Menteri Keuangan ASEAN+3 di tahun 2009, AMRO terbentuk pada bulan Mei 2011 dengan status hukum sebagai suatu badan usaha non publik (*company limited by guarantee*) yang berdomisili di Singapura. Selain melaksanakan tugas dan fungsi *surveillance* bagi kawasan, AMRO berperan penting untuk memberikan rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan untuk aktivasi *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) sebagai suatu bentuk fasilitas jaring pengaman stabilitas keuangan di tingkat kawasan.

Pada tahun 2013, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 telah menyepakati naskah Persetujuan Pembentukan *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* ("*AMRO Agreement*") yang menjadi dasar hukum peningkatan status hukum AMRO menjadi suatu organisasi internasional, dengan maksud agar AMRO dapat menjalankan fungsinya sebagai unit *surveillance* independen di kawasan secara lebih efektif. *AMRO Agreement* dimaksud kemudian ditandatangani oleh seluruh negara ASEAN+3 pada tanggal 24 Oktober 2014 di Washington, DC, Amerika Serikat. Menteri Keuangan mewakili Pemerintah Indonesia telah menandatangani *AMRO Agreement* dan Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian tersebut melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 berikut penerbitan Piagam Pengesahan oleh Menteri Luar Negeri Nomor 02/KA/02/2016/IR tanggal 2 Februari 2016.

Dalam sambutannya, Yoichi Nemoto selaku Direktur AMRO, menggarisbawahi komitmennya untuk melanjutkan upaya-upaya peningkatan kegiatan *surveillance* AMRO untuk mendukung *CMIM Agreement* yang saat ini telah memiliki jumlah komitmen sebesar USD 240 miliar, sehingga AMRO dapat menjalankan misi utamanya untuk berperan dalam memastikan stabilitas makroekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN+3.